

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Manajemen Lingkungan

2.1.1 Pengertian Manajemen Lingkungan

Manajemen pada intinya adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu (**Musselman dan Jackson, 1992**). Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala hal di sekeliling kita yang terkait kepadanya secara langsung atau tidak langsung, segala sesuatu yang hidup dan kegiatan kita berhubungan dengannya dan bergantung padanya (**Ananichef, 1976 dalam Notohadiprawiro, 2006**). Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia dan hubungan antar faktor-faktor tersebut. Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan (**Purwanto, 2004**).

Menurut **Strum (1998)** dalam **Purwanto (2002)**, manajemen lingkungan merupakan sebuah aspek dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan dan mengarah pada implementasi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Manajemen lingkungan berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu sebelum adanya ISO 14001 dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lain. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural dan dapat diulang disebut dengan *Environmental Management System (EMS)*.

Menurut **ISO 14001 (1996)** dalam **Purwanto (2004: 2)**, sistem manajemen lingkungan (EMS) adalah:

“That part of the overall management system which includes organizational structure planning, activities, responsibilities, practices, procedures, processes, and resources for developing, implementing, achieving, reviewing, and maintaining the environmental policy.”

Kutipan di atas menjelaskan bahwa EMS adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan. Sehingga EMS

memiliki elemen kunci yaitu pernyataan kebijakan lingkungan dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang lebih luas.

2.1.2 Cakupan Manajemen Lingkungan

Menurut **Purwanto (2004)**, terdapat pendapat yang membagi manajemen lingkungan ke dalam dua cakupan, yaitu:

1. *Lingkungan internal.*
2. *Lingkungan eksternal.*

Lingkungan internal dapat memengaruhi aktivitas suatu organisasi secara langsung. Menurut **Suyanto (2009)**, hasil dari analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan atau keunggulan perusahaan itu meliputi keunggulan pemasaran, keunggulan sumber daya manusia, keunggulan keuangan, keunggulan operasi dan keunggulan organisasi dan manajemen. Lingkungan internal meliputi: pemilik (*owners*), dewan direksi, karyawan dan lingkungan kerja fisik.

Menurut **Handoko (2000)**, lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar organisasi, di mana unsur-unsur ini sulit untuk dikendalikan dan diketahui lebih awal oleh manajer. Komponen yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal adalah segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitar organisasi, termasuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, dan pihak yang mewakilinya (pemerintah, pelanggan, investor/pemilik). Aktifitas yang terkait yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik dan lain-lain.

Nilasari dan Wiludjeng (2006) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal dibagi menjadi dua yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan manajemen, sedangkan lingkungan eksternal makro adalah lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung, seperti kondisi perekonomian, perubahan teknologi, politik, sosial dan lain-lain.

2.1.3 Orientasi Kebijakan Manajemen Lingkungan

Manajemen lingkungan menurut orientasi kebijakannya secara umum dapat dibagi dua, yaitu (**Marcus & Willig, 1997**):

1. Berorientasi pemenuhan (*regulation compliance*).
2. Berorientasi setelah pemenuhan (*beyond compliance*).

Menurut **Purwanto (2004)**, kebijakan manajemen lingkungan berorientasi pemenuhan merupakan awal pemikiran manajemen lingkungan di perusahaan. Kebijakan ini berasal dari pemikiran bahwa akibat yang ditimbulkan aktifitas perusahaan tidak boleh sampai merugikan keberlangsungan bisnis perusahaan, caranya dengan menaati peraturan pemerintah semaksimal mungkin untuk menghindari penalti/denda lingkungan, klaim dari masyarakat sekitar dan lain-lain, contohnya dengan memakai metode reaktif, *ad-hoc*, dan pendekatan *end-of-pipe* (menanggulangi masalah polusi dan limbah pada hasil akhirnya, seperti lewat penyaring udara, teknologi pengolah air limbah dan lain-lain). Sedangkan kebijakan manajemen lingkungan berorientasi setelah pemenuhan berangkat dari pemikiran bahwa cara tradisional menangani isu lingkungan –dalam cara reaktif, *adhoc*, pendekatan *end-of-pipe*-telah terbukti tidak efisien.

2.1.4 Perangkat Manajemen Lingkungan

Menurut **Purwanto (2005)**, selain manajemen lingkungan sebagai sistem (EMS), perangkat lain yang disarankan pakar manajemen lingkungan untuk sebaiknya dipergunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya secara garis besar terbagi tiga yaitu:

1. Pencegahan Polusi (*Pollution Prevention*)
2. *Cleaner Production*
3. Eko-efisiensi

Menurut **Hidayat (2011)**, pencegahan polusi lebih sering dimaknai sebagai opsi manajemen lingkungan yang memberi keuntungan dan merupakan suatu kearifan bagi kehidupan. Menurut **Sudrajat (2007)**, konsep *pollution prevention* dikembangkan oleh US – EPA (Amerika Serikat) pada tahun 1999 sebagai akibat dari kegagalan pemantauan pelepasan bahan berbahaya dan beracun serta kehadiran *Pollution Prevention Act* – Undang-undang Pencegahan Pencemaran dan kemudian penerbitan *Right to Know Act*. Konsep ini menyatakan bahwa *recycle* harus dilakukan langsung atau *in-pipe recycle*. Konsep ini dikembangkan karena konsep pengelolaan limbah yang berdasarkan *end of pipetreatment technology* dan *waste minimization* yang telah diterapkan tidak dapat memenuhi sasaran untuk menahan laju pemanfaatan sumber alam yang terbatas serta perlindungan kualitas lingkungan untuk mempertahankan kehidupan berbagai makhluk. Perbedaan antara konsep *waste minimization* dan *pollution prevention* terletak pada penetapan peluang utama.

Definisi *Cleaner Production* (CP) yang diadopsi oleh **UNEP (2000: 1)** adalah sebagai berikut:

“The term Cleaner Production was defined by UNEP in 1990 as the continuous application of an integrated environmental strategy to processes, products and services to increase efficiency and reduce risks to humans and the environment”

Kutipan di atas menjelaskan bahwa CP adalah aplikasi terus-menerus dari strategi terintegrasi perlindungan lingkungan pada proses, produk, dan jasa-jasa untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan, dan mengurangi resiko pada manusia dan lingkungan. CP dapat diaplikasikan pada proses yang digunakan dalam setiap industri, untuk memproduksi, dan pada macam-macam jasa yang disediakan dalam masyarakat.

Keistimewaan produksi bersih menurut **Sudrajat(2007)** antara lain kekekalan bahan baku dan energi, penghapusan penggunaan bahan baku yang beracun, dan penyusutan bobot atau volum serta tingkat peracunan berbagai pembebasan limbah dari suatu proses. Selain itu juga penyusutan pengaruh negatif produk selama daur kehidupan mulai dari pengambilan bahan baku hingga pembuangan produk yang usang atau rusak atau habis usia-guna serta strategi yang ditujukan pada penyertaan pertimbangan lingkungan dari awal perancangan hingga pelayanan.

Sudrajat (2007) mengatakan bahwa produksi bersih membutuhkan perubahan sikap, pengelolaan lingkungan yang bertanggung-jawab dan penilaian pilihan teknologi. Salah satu upaya produksi bersih yang paling sederhana untuk diterapkan pada proses produksi adalah *good housekeeping*. Produksi bersih tidak selalu membutuhkan kegiatan yang mahal atau teknologi yang canggih. Seringkali penghematan potensial dapat menghasilkan peningkatan daya saing di pasar. Konsep ini meliputi pemanfaatan sumber alam secara efisien yang dapat meminimalisasi limbah yang dihasilkan serta penyusutan risiko bagi kesehatan dan keselamatan manusia.

Menurut **Purwanto (2005)**, istilah eko-efisiensi sebenarnya resmi dipopulerkan oleh *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* di tahun 1992, yang didefinisikan sebagai pengiriman barang atau jasa secara kompetitif sehingga dapat memuaskan kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi dampak ekologis dan intensitas penggunaan sumberdaya secara progresif di seluruh siklus hidup ke tingkat yang relatif sama dengan estimasi kapasitas bumi. Pada intinya, menurut **Hansen dan Mowen (2009)**, eko-efisiensi mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil mengurangi dampak negatif lingkungan, konsumsi sumber daya dan biaya secara simultan. Eko-efisiensi mengimplikasikan peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan.

Menurut **Purwaningsih (2008)**, tujuan dari eko-efisiensi sendiri adalah untuk mengeliminasi atau meminimalkan emisi limbah beracun yang terbuang ke lingkungan hidup, sehingga lingkungan tidak akan terbebani oleh limbah-limbah buangan industri ataupun polutan yang berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan. Salah satu upaya pencapaian eko-efisiensi adalah melalui penerapan kerjasama antar pelaku usaha yang dilakukan pada rantai nilai aktivitas produksi. Terjalannya kerjasama antar pelaku usaha pada sektor industri tersebut diharapkan mampu mewujudkan efisiensi di lingkungan industri, baik efisiensi ekonomi, efisiensi ekologi maupun perbaikan dalam hal sosial organisasi atau perbaikan manajemen usaha.

2.2 Dorongan Manajemen Lingkungan

2.2.1 Pengertian Dorongan Manajemen Lingkungan

Menurut **Ja'far dan Arifah (2006)**, dorongan manajemen lingkungan adalah kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen lingkungan.

2.2.2 Faktor-faktor Dorongan Manajemen Lingkungan

Berry dan Rondinely (1998) mensinyalir ada beberapa kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen lingkungan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. *Regulatory demand.*
2. *Cost factors.*
3. *Stakeholder forces.*
4. *Competitive requirements.*

Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut **Ja'far dan Arifah (2006)**, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan muncul sejak 30 tahun terakhir ini, setelah masyarakat meningkatkan tekanannya kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai dampak meluasnya polusi. **Cahyono (2006)** mengatakan bahwa dorongan yang muncul dari pemerintah terjadi melalui berbagai aturan yang ada di bidang lingkungan, sehingga meningkatkan tanggung jawab yang semakin besar bagi perusahaan. Lebih jauh lagi, ketidakpedulian untuk melakukan berbagai aturan lingkungan dapat menyebabkan munculnya krisis etika yang menjadikan perusahaan menanggung biaya yang lebih mahal di masa mendatang. Menurut **Bromhead (2005)**, peraturan pemerintah merupakan dorongan yang paling penting dalam manajemen lingkungan. Peraturan akan menyediakan standar-standar yang mana perusahaan akan patuh terhadapnya. Di sisi lain, berbagai macam regulasi

tentang lingkungan belum mampu menciptakan *win-win solution* diantara pihak terkait dalam menciptakan inovasi dan persaingan serta tingkat produktivitas yang tinggi terhadap seluruh perusahaan.

Komplain terhadap produk-produk perusahaandapat menyebabkan munculnya biaya pengawasan kualitas yang tinggi, karena perusahaan perlu mempersiapkan dengan baik semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksinya. Hal ini secara langsung akan berdampak pada munculnya biaya yang cukup tinggi, seperti biaya sorting bahan baku, biaya pengawasan proses produksi, dan biaya pengetesan. Upaya perusahaan untuk mengurangi polusi juga menimbulkan konsekwensi munculnya berbagai biaya, seperti penyediaan pengolahan limbah, penggunaan mesin yang *clean technology*, dan biaya pencegahan kebersihan. Namun, menurut **Bromhead (2005)** minimisasi limbah dan pengelolaan energi adalah dua area yang menjadi potensi penghematan terbesar bagi perusahaan di masa mendatang.

Strategi pendekatan terhadap manajemen lingkungan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, yakni mengurangi *waste* dan mengurangi biaya produksi, demikian juga responterhadap permintaan konsumen dan *stakeholder*. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* yang bervariasi dengan menemukan berbagai kebutuhan akan manajemen lingkungan yang proaktif. **Cahyono (2006)** mengatakan bahwa perusahaan dituntut untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumen maupun *stakeholders* yang dapat dilakukan melalui pendefinisian ulang misi perusahaan, memperbaiki sistem nilai yang berlaku, dan menemukan cara-cara melalui manajemen perubahan, percepatan pelatihan dan pendidikan, serta modifikasi perilaku seluiruh organisasi.

Semakin berkembangnya pasar global dan munculnya berbagai kesepakatan perdagangan sangat berpengaruh pada munculnya gerakan standarisasi manajemen kualitas lingkungan. Menurut **Olembo (1996)**, perusahaan yang akansurvive adalah perusahaan yang mengerti bahwa produksi bersih (*cleaner production*) tidak hanya baik bagi lingkungan dan masyarakat, tapi juga bagi perekonomian. Persaingan nasional maupun internasional telah menuntut perusahaan untuk dapat mendapatkan jaminan dibidang kualitas, antara lain seri ISO 9000. Sedangkan untuk seri ISO 14000 dominan untuk standar internasional dalam sistem manajemen lingkungan.

2.3 Manajemen Lingkungan Proaktif

2.3.1 Pengertian Manajemen Lingkungan Proaktif

Ja'far dan Arifah (2006) mendefinisikan Manajemen Lingkungan Proaktif sebagai suatu sistem manajemen lingkungan yang komprehensif yang dilakukan manajemen lingkungan secara proaktif sebagai akibat dari dorongan-dorongan manajemen lingkungan.

2.3.2 Pendekatan Manajemen Lingkungan Proaktif

Menurut **Berry dan Rondinely (1998)**, sistem manajemen proaktif merupakan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif yang terdiri dari kombinasi lima pendekatan, yaitu:

1. meminimalkan dan mencegah *waste*
2. manajemen *demand side*
3. desain lingkungan
4. *product stewardship*
5. akuntansi *full-costing*.

Meminimalkan dan mencegah *waste* merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan aktivitas pencegahan terhadap aktivitas yang tidak berguna. Menurut **Parrie (2007)**, dengan hanya menggunakan elemen-elemen pekerjaan yang kita butuhkan, seperti selalu teratur dan menetapkan standar pekerjaan, kita dapat meningkatkan produksi sekaligus mengurangi biaya dan *waste*. Pencegahan polusi merupakan penggunaan material atau bahan baku, proses produksi atau praktek-praktek yang dapat mengurangi, meminimalkan atau mengeliminasi penyebab polusi atau sumber-sumber polusi.

Menurut **Berry dan Rondinely (1998)**, *demand-side management* merupakan sebuah pendekatan dalam pencegahan polusi yang asal mulanya digunakan dalam dunia industri. Konsep ini difokuskan pada pemahaman kebutuhan dan preferensi konsumen dalam penggunaan produk, dan didasarkan pada tiga prinsip yang mendasar, yaitu: tidak menyisakan produk yang *waste*, menjual sesuai dengan jumlah kebutuhan konsumen dan membuat konsumen lebih efisien dalam menggunakan produk. *Demand-side management* industri mengharuskan perusahaan untuk melihat dirinya sendiri dalam cara pandang baru, sehingga dapat menemukan peluang-peluang bisnis baru.

Desain lingkungan merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dalam manajemen lingkungan proaktif. **Khanna dan Speir (2007)** mengatakan bahwa banyak

perusahaan yang memandang bahwa pengendalian polusi itu identik dengan meminimalkan aliran limbah yang berhubungan dengan desain. Perusahaan sering dihadapkan pada inefisiensi dalam mendesain produk, misalnya produk tidak dapat dirakit kembali, di-*upgrade* kembali, dan di-*recycle*.

Produk *stewardship* merupakan praktek-praktek yang dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan melalui masalah-masalah dalam desain, manufaktur, distribusi, pemakaian atau penjualan produk. Di beberapa negara telah muncul peraturan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan *reclaim*, *recycling* dan *re-manufacturing* produk mereka. Alternatif produk yang memiliki *less pollution* dan *alternatif material*, sumber energi, metode processing yang mengurangi *waste* menjadi kebutuhan bagi perusahaan (Berry dan Rondinely, 1998).

Full cost environmental accounting merupakan konsep *cost environmental* yang secara langsung akan berpengaruh terhadap individu, masyarakat dan lingkungan yang biasanya tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan. Horney, Hendrickson, Lave dan Matthews (2007) mengatakan bahwa *full cost accounting* memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi biaya lingkungan sebagai biaya tertentu yang terkait dengan produk, proses produksi dan sebuah proyek dengan mempertimbangkan empat macam biaya, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tidak menentu, dan biaya yang tidak kelihatan.

2.4 Kinerja Lingkungan

2.4.1 Pengertian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan keseluruhan pencapaian perusahaan dalam mengelola masalah-masalah lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan (Sofia, 2009). Menurut Ikhsan (2008), kinerja lingkungan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang terkait langsung dengan lingkungan alam sekitarnya. Sedangkan Suratno, Darsono dan Mutmainah (2006) menyatakan bahwa kinerja lingkungan (*environmental performance*) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*).

Menurut Tyteca dan Carlents (2000), pengukuran kinerja lingkungan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dari perdebatan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang dikarenakan oleh beragam tekanan dan kepentingan. Indikator kinerja lingkungan dihadapkan pada banyak harapan. Selain itu, kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya.

Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target.

2.4.2 Pengukuran Kinerja Lingkungan

Menurut **Purwanto (2003)**, kinerja lingkungan dapat diukur dengan dua cara, yaitu:

1. Kinerja lingkungan kualitatif.
2. Kinerja lingkungan kuantitatif.

Menurut **Purwanto (2003)**, kinerja lingkungan kualitatif adalah ukuran yang didasarkan pada penilaian semantik, pandangan, persepsi seseorang berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap sesuatu, sedangkan kinerja lingkungan kuantitatif adalah ukuran yang didasarkan pada data empiris dan hasil numerik yang mengkarakteristikkan kinerja dalam bentuk fisik, keuangan, atau bentuk lain. Keuntungan dari kinerja lingkungan kualitatif adalah pengumpulan datanya relatif mudah dilakukan dan mudah diimplementasikan. Kerugiannya adalah metrik ini secara implisit melibatkan subyektifitas dan karenanya sulit divalidasi. Menurut **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2005)**, indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, misalnya, tentang kepuasan pengguna jasa. Sedangkan contoh dari kinerja lingkungan kuantitatif adalah batas baku mutu limbah. Keuntungan dari metrik ini adalah obyektif, sangat berarti, dan dapat diverifikasi. Kerugiannya adalah data yang diperlukan mungkin sulit diperoleh atau bahkan tak tersedia.

2.4.3 Jenis Indikator Kinerja Lingkungan

Jenis ukuran indikator kinerja lingkungan secara umum terdiri dari dua golongan yaitu (**Global Environmental Management Initiative, 1998**):

1. Indikator *lagging* yaitu ukuran kinerja *end-process*, mengukur *output* hasil proses seperti jumlah polutan dikeluarkan.
2. Indikator *leading* yaitu ukuran kinerja *in-proses*.

Menurut **Ikhsan (2009)**, jenis indikator yang sudah banyak dikenal yaitu indikator *lagging*, seperti jumlah limbah yang dihasilkan dan lain-lain. Manfaat utama menggunakan indikator jenis ini adalah mudah digunakan dan mudah dimengerti. Kerugian utamanya adalah sesuai namanya yaitu indikator tertinggal (*lag*), mereka mencerminkan situasi dimana aksi korektif hanya dapat diambil setelah kejadian, bahkan setelah memakan biaya tertentu, seperti denda atau turunnya citra perusahaan akibat keluhan dari masyarakat. Indikator ini juga tidak mengidentifikasi akar penyebab defisiensi dan bagaimana kejadiannya dapat

dicegah. Efek dari tindakan korektif tidak akan muncul hingga hasilnya muncul di tahun berikutnya, sehingga ukuran kinerja akan terasa terlambat.

Jenis indikator kedua yaitu indikator *leading* atau indikator *in-process*. Menurut **Global Environmental Management Initiative (1998)**, indikator *leading* adalah indikator yang mengukur implementasi prosedur yang dilakukan, atau mengukur faktor apa yang diharapkan membawa pada perbaikan kinerja lingkungan. Manfaat utama jenis ukuran ini adalah aksi koreksi seringkali dapat diambil sebelum terjadi defisiensi muncul yang mengurangi kinerja lingkungan. Sayangnya, indikator *leading* seringkali sulit dihitung (beberapa bahkan cenderung kualitatif daripada kuantitatif) dan hasilnya tidak mendapat perhatian dari para pemegang saham (termasuk publik).

2.4.4 Dimensi Kinerja Lingkungan

Jiminez dan Lorente (2001) mengelompokkan dimensi kinerja lingkungan menjadi empat kategori, antara lain:

1. *Internal system measure.*
2. *External stakeholders relations.*
3. *External impacts.*
4. *Internal compliance.*

Menurut **Jiminez dan Lorente (2001)**, *internal system measure* merupakan proses organisasional perusahaan yang didesain untuk memperbaiki kinerja lingkungan, misalnya audit lingkungan dan penghargaan terhadap prestasi lingkungan. Sedangkan *external stakeholders relations* adalah upaya perusahaan agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya didasarkan pada persepsi positif publik terhadap aktivitas perusahaan. Indikator dapat ditampilkan dengan menggunakan opini *stakeholders* terhadap efek lingkungan dari aktivitas perusahaan. *External impacts* adalah indikator yang digunakan dengan cara mengevaluasi kontribusi perusahaan dalam upaya perbaikan lingkungan, dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap polusi air, udara, penggunaan sumber daya dan level kekaduhan. Dalam *internal compliance*, indikator yang digunakan adalah beberapa jumlah regulasi lingkungan yang tidak dipenuhi, atau tingkat komitmen yang rendah terhadap berbagai peraturan tentang lingkungan.

Jiminez dan Lorente (2001) lebih menekankan pada sisi internal dan eksternal dalam upaya mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Sisi internal menyangkut berbagai program yang terkait dengan perbaikan kinerja lingkungan dan seberapa besar perusahaan telah berkomitmen dengan berbagai regulasi untuk memenuhi standar kinerja lingkungan.

2.5 Pengungkapan

2.5.1 Pengertian Pengungkapan

Menurut **Hendriksen dan Breda (2004; 428)**, pengungkapan adalah:

“Penyajian informasi yang diperlukan untuk mencapai operasi yang optimum dalam pasar modal yang efisien. Hal ini menyiratkan bahwa harus disajikan informasi yang cukup agar memungkinkan diprediksinya kecenderungan (*trend*) dividen masa depan serta variabilitas dan kovariabilitas imbalan masa depan dalam pasar tersebut. Penekanannya haruslah pada preferensi investor dan analisis keuangan yang sudah berpengalaman.”

Oleh karena itu, pengungkapan ditujukan untuk memberikan informasi umum kepada semua pemakai di luar mereka yang mengemban tanggung jawab pengendalian dan manajemen organisasi. Dalam pengertian terluas, kata pengungkapan hanya berarti penyampaian (*release*) informasi. Akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang lebih terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan.

2.5.2 Tujuan Pengungkapan

Menurut **Hendriksen dan Breda (2004)**, tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin, dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus dihilangkan agar penyajian mempunyai arti yang dapat dimengerti.

2.5.3 Tingkat Pengungkapan

Tuanakotta (1986) membagi tingkat pengungkapan menjadi tiga bagian yakni:

1. Pengungkapan memadai (*adequate*).
2. Pengungkapan wajar (*fair*).
3. Pengungkapan penuh (*full*).

Pengungkapan memadai merupakan jenis pengungkapan yang paling banyak digunakan, tetapi ungkapan ini menyiratkan jumlah pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan. Konotasi pengertian ini adalah negatif. Sebaliknya, pengungkapan wajar dan penuh merupakan konsep-konsep yang positif. Pengungkapan wajar selalu menyiratkan tujuan-tujuan etis yaitu untuk memberikan perlakuan yang sama pada semua pihak yang merupakan pembaca potensial dari laporan

keuangan. Pengungkapan penuh menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan. Bagi sebagian orang, pengungkapan lengkap berarti penyajian informasi secara berlebihan dan karenanya menjadi tidak tepat. Terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian rincian-rincian yang tidak penting bisa menyembunyikan informasi yang signifikan serta membuat laporan keuangan sulit ditafsirkan.

2.5.4 Tipe Pengungkapan

Menurut **Nuraini F. (2010)**, pengungkapan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Informasi yang diungkapkan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)
2. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Mandatory disclosure adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktek pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi (**Nuraini F., 2010**).

Voluntary disclosure adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Menurut **Juniarti dan Sentosa (2009)**, pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan dapat mendorong keyakinan investor dan kreditur dalam menentukan kebijakan investasi yang diambil. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

2.5.5 Manfaat Pengungkapan Bagi Pemakai Informasi

Ada beberapa manfaat pengungkapan lingkungan yang terkait dengan akuntansi sosial perusahaan menurut Sofia (2009), antara lain para pengguna laporan keuangan akan mendapat informasi yang lebih luas mengenai efek lingkungan hidup terhadap perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatur hal ini. Selain itu, keterlibatan perusahaan dan pertanggungjawaban sosial akan meningkatkan citra perusahaan terhadap dunia luar. Tujuan lain dari pengungkapan adalah sebagai media untuk mengomunikasikan realita sosial untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengungkapan sosial juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dan kebutuhan-kebutuhan yang berkepentingan seperti serikat pekerja, aktivis lingkungan dan kalangan lain.

2.6 Public Environmental Reporting

2.6.1 Pengertian Public Environmental Reporting

Menurut Suratno et al (2006), *public environmental reporting* (pengungkapan lingkungan) merupakan jenis pengungkapan sukarela. Pengungkapan lingkungan adalah penyajian informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan.

2.6.2 Hal-hal yang Diungkapkan dalam Public Environmental Reporting

Menurut Sofia (2009), pengungkapan data akuntansi lingkungan biasanya meliputi proses dan hasil kegiatan konservasi lingkungan, *item-item* yang membentuk standar akuntansi lingkungan dan hasil yang dikumpulkan dari akuntansi lingkungan. Sedangkan menurut Blacconiere dan Patten (1994), dalam mengungkapkan pengukuran kinerja lingkungan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Pernyataan yang mengungkapkan peraturan lingkungan yang berlaku saat ini.
2. Pernyataan yang mengungkapkan usaha apa saja yang telah dilakukan perusahaan dalam mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan.
3. Penyajian jumlah moneter masa lalu atau saat ini yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan.
4. Penyajian estimasi jumlah pengeluaran moneter masa mendatang untuk pengendalian lingkungan.
5. Pengungkapan aksi tuntutan hukum lingkungan yang potensial ditujukan kepada perusahaan (pengungkapan tuntutan hukum lingkungan).

Public environmental reporting merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Pada umumnya terdapat pada bagian terpisah pada *sustainability report* atau tercantum dalam *annual report*.

2.7 Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan

Permasalahan lingkungan senantiasa muncul terus-menerus seiring dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Perusahaan seharusnya menyadari dan bertanggung jawab terhadap lingkungan global yang semakin memanas, penciptaan produk yang bersih dan pengadaan bahan baku yang ramah lingkungan. Namun, mewujudkan perusahaan yang *going green* memiliki konsekuensi yang besar dari segi *cost*, namun harus menjadi bagian dari pengembangan strategi perusahaan.

Berry dan Rondinelly (1998) menyatakan bahwa tuntutan untuk melakukan manajemen lingkungan yang baik menjadi kewajiban, dan didasarkan pada empat jenis dorongan, yaitu: *regulatory demands*, *cost factors*, *stakeholders forces* dan *competitive requirements*. **Cahyono (2006)** mengatakan bahwa konsumen dan investor cenderung mengamati bahwa terdapat hubungan antara kinerja bisnis dan kualitas lingkungan. Tren ke arah kinerja lingkungan yang baik secara umum sangat dipengaruhi oleh tekanan dari masyarakat dan pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan penciptaan lingkungan yang lebih bersih.

Berbagai dorongan baik secara langsung ataupun tidak langsung menuntut perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan untuk membentuk suatu kinerja lingkungan yang baik. Semakin banyak dorongan terhadap perusahaan, baik internal maupun eksternal, maka perusahaan akan semakin terpicu untuk membentuk suatu kinerja lingkungan yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara dorongan manajemen lingkungan dan kinerja lingkungan berarah positif.

2.8 Pengaruh Manajemen Lingkungan Proaktif terhadap Kinerja Lingkungan

Di beberapa negara industri perusahaan-perusahaan sudah menyadari pentingnya *going green*, dan untuk merealisasikannya diambil tindakan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan profits secara simultan. Strategi perusahaan secara proaktif di bidang lingkungan yang dibangun prinsip-prinsip manajemen khususnya dalam mengurangi *waste* merupakan respon dari permintaan konsumen dan *stakeholders*. Konsumen cenderung menuntut proses produksi dan produk yang *clean*. Perusahaan dituntut untuk memberikan

kepuasan baik terhadap konsumen maupun *stakeholders*, yang dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan yang proaktif di bidang lingkungan (**Cahyono, 2006**).

Perusahaan sudah menyadari perlunya pendekatan proaktif terhadap tuntutan lingkungan dengan mengantisipasi dampak lingkungan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Tindakan-tindakan proaktif yang dilakukan oleh perusahaan menciptakan suatu kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan inilah yang akan dinilai dan dijadikan tolak ukur performa dan komitmen perusahaan dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup.

Semakin banyak perusahaan melakukan tindakan-tindakan proaktif di bidang lingkungan, maka semakin baik pula kinerja lingkungannya. Dengan meningkatkan kinerja lingkungan, peran perusahaan dalam upaya pelestarian dan konservasi lingkungan hidup akan semakin besar. Hal ini akan mencerminkan citra yang baik di mata masyarakat dan pemegang saham. Jadi, hubungan antara manajemen lingkungan proaktif terhadap kinerja lingkungan berarah positif.

2.9 Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan dan Manajemen Lingkungan Proaktif terhadap Kinerja Lingkungan

Sebagai ukuran keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan manajemen lingkungan proaktif ditambah dorongan manajemen lingkungan dari berbagai sisi, maka dapat dilakukan identifikasi kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan akan tercapai pada level yang tinggi jika dorongan terhadap pengelolaan lingkungan terus dilakukan oleh berbagai instansi dan apabila perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan secara terkendali (**Berry dan Rondinelli, 1998**).

Dorongan manajemen lingkungan tanpa didukung tindakan-tindakan proaktif bisa jadi tidak menghasilkan kinerja lingkungan yang baik, begitu juga sebaliknya. Namun apabila kedua variabel ini digabungkan, dimana dorongan manajemen lingkungan diwujudkan oleh perusahaan dalam bentuk manajemen lingkungan yang proaktif, maka kinerja lingkungan yang maksimal dapat terbentuk. Semakin besar dorongan pada perusahaan dan semakin banyak tindakan lingkungan yang proaktif dilakukan, maka level kinerja lingkungan yang terbentuk pun akan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh **Cahyono (2006)** dan hasilnya ada pengaruh signifikan antara dorongan manajemen lingkungan dan manajemen lingkungan proaktif terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan menengah sampai perusahaan besar. Hal itu dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki teknologi yang lebih tinggi untuk meminimalisasi polusi dan *product design*.

2.10 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Public Environmental Reporting*

Penelitian empiris mengenai hubungan *public environmental reporting* dengan kinerja lingkungan (*environmental performance*) telah menemukan hubungan yang beragam. Penetapan hubungan antara *environmental performance* dengan *public environmental reporting* dilihat dari perspektif tanggung jawab sosial perusahaan masih belum menemukan hubungan yang pasti karena masih banyak penelitian yang berbeda-beda (Handayani, 2010).

Kinerja lingkungan akan berpengaruh terhadap besarnya pengungkapan lingkungan. Semakin besar peran dari perusahaan dalam kegiatan lingkungan hidup, maka semakin besar pula pengungkapan lingkungan yang diungkapkan di dalam laporan keuangan. Dengan meningkatkan kinerja lingkungan, maka akan menjadi berita baik tersendiri bagi perusahaan. Dengan kinerja perusahaan terhadap lingkungan yang baik yang kemudian juga diungkapkan didalam laporan tahunan akan semakin menarik para investor. Karena para investor pastinya akan lebih melihat bagaimana kinerja dari perusahaan dimana mereka akan menanamkan investasinya ataupun didalam memutuskan kerja sama dengan perusahaan tersebut.

Semakin perusahaan menaikkan kualitas kinerjanya terhadap lingkungan dan kemudian mengungkapkan kinerjanya tersebut ke dalam laporan tahunannya, akan semakin baik pula perusahaan di mata para investor maupun masyarakat. Jadi semakin banyak perusahaan berperan di dalam kegiatan lingkungan, akan semakin banyak pula yang harus diungkapkan oleh perusahaan mengenai kinerja lingkungan yang dilakukannya dalam laporan tahunannya. Hal ini akan mencerminkan transparansi dari perusahaan tersebut bahwa perusahaan juga berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya sehingga masyarakat juga akan tahu seberapa besar andil perusahaan terhadap lingkungannya. Maka hubungan antara *environmental performance* dengan *environmental disclosure* dapat dikatakan berarah positif.

Penelitian yang meneliti pengaruh kinerja lingkungan terhadap *public environmental reporting* di antaranya dilakukan oleh Ja'far dan Arifah (2006) dan Cahyono (2006). Penelitian Ja'far dan Arifah (2006) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara dorongan manajemen lingkungan dan manajemen lingkungan proaktif terhadap kinerja lingkungan, kemudian ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *public environmental reporting*, sementara penelitian Cahyono (2006) menunjukkan variabel dorongan manajemen lingkungan dan manajemen lingkungan proaktif berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan pada 143 perusahaan manufaktur.